

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PADANG DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat***

***Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**DISUSUN OLEH:**

**MAYA ULIA SARI  
2010012111064**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 01/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg: 01/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : Maya Ulia Sari  
NPM : 2010012111064  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam  
Pemenuhan Kesejahteraan Anak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Pembimbing) (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

# PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK

Maya Ulia Sari<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [mayauiasari31@gmail.com](mailto:mayauiasari31@gmail.com)

## ABSTRACT

*The DP3AP2KB Service has a role in ensuring children's rights. This is regulated in Padang Mayor Regulation Number 49 of 2022 concerning the Position, Composition, Organization, Duties, Functions and Work Procedures of the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Services. However, there are still children in difficult conditions. In other words, there needs to be a role for DP3AP2KB in fulfilling children's welfare. Formulation of the problem; 1) What is the role of DP3AP2KB Padang City in fulfilling child welfare? 2) What are the obstacles faced by DP3AP2KB Padang City in fulfilling child welfare? 3) What are the efforts made by DP3AP2KB Padang City to fulfill child welfare? Types of Sociological Juridical Research. The data sources used were primary and secondary data, then data collection techniques using document studies and interviews were analyzed qualitatively. Research results: 1) The role of DP3AP2KB Padang City in fulfilling children's welfare is collaborating and collaborating with Regional Apparatus Organizations (OPD) and Children's Friendly Companies in Padang City. 2) The obstacles faced by the Padang City DP3AP2KB in fulfilling child welfare in post-Covid-19 funding and the lack of maximum cooperation with the relevant OPD. 3) The efforts made by DP3AP2KB Padang City to fulfill child welfare are to create and implement programs about children.*

**Keywords:** *Role, DP3AP2KB, Child Welfare*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau selanjutnya disebut DP3AP2KB dalam menjamin kesejahteraan anak sebagai generasi sangat dibutuhkan.

DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya DP3AP2KB mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan data Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2019 hingga 2021 di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada pemenuhan kesejahteraan anak, pada tahun 2019 capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Sumbar sebesar

(64,23), tahun 2020 (66.15), tahun 2021 (59,64). Data tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan anak jika dilihat dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Dari data terbaru 2023 Kota Padang meraih Kategori Utama. Namun, jika dilihat dari apa yang terjadi di kehidupan nyata masih banyak anak-anak yang menjadi pengamen, pengemis, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan belum sejahtera.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul:

**“PERANAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PADANG DALAM  
PEMENUHAN KESEJAHTERAAN  
ANAK”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan dari DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota

Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak.

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data  
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara
4. Analisa Data  
Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Peranan dari DP3AP2KB Kota Padang dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang Ibu Wirdanis. Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak yaitu:

1. Kerja sama atau berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang  
Pengukuran pada kesejahteraan anak DP3AP2KB Kota Padang menjadikan Program Kota Layak Anak (KLA) sebagai dasar pengukurannya. beberapa OPD terkait yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan DP3AP2KB Kota Padang untuk pemenuhan kesejahteraan anak dapat dilihat dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 354 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun

2021-2023. DP3AP2KB dalam gugus Tugas Layak Anak kedudukannya berada pada bagian sekretaris.

2. Kerja sama atau berkolaborasi dengan Perusahaan atau Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) Kota Padang  
Peranan DP3AP2KB Kota Padang pada kerja sama yang dilakukan dengan APSAI berkedudukan sebagai **Sekretariat Pembina**. Pada tahun 2023 sebanyak 29 perusahaan yang menjadi anggota APSAI di Kota Padang.

#### **B. Kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang Ibu Wirdanis. Pada prakteknya masih banyak kendala-kendala yang ditemui DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak yakni:

1. Permasalahan pendanaan pasca Covid-19. beberapa inisiatif atau program-program yang sebelumnya direncanakan untuk pemenuhan kesejahteraan anak harus di revisi atau bahkan ditunda
2. Kehadiran anak yang berasal dari luar Kota Padang. Hal tersebut tentu menjadi kendala DP3AP2KB karena sulitnya pendataan dan pemantauan terhadap anak tersebut karena asal mereka yang bukan berasal wilayah Kota Padang.
3. Masih kurangnya fasilitas yang ramah anak

4. Masih kurangnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

#### **C. Upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak**

1. Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anak didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang mengadopsi sistem pembangunan berbasis hak anak. Kota Padang telah meraih Kategori Utama untuk penghargaan Kota Layak Anak pada tahun 2023.
2. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). DP3AP2KB Kota Padang membentuk lembaga konsultasi dan psikoedukasi yakni Puspaga yang mana Kota Padang memiliki nama tersendiri yakni Puspaga Basamo.
3. Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak merupakan konsep yang dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan memprioritaskan kebutuhan anak.
4. Masjid Ramah Anak. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) masjid di Kota Padang yang sudah mendapatkan kategori Masjid Ramah Anak yakni Masjid Baitul Arafah dan Masjid Darul Huda Perumdam I.
5. Pengadilan Ramah Anak. Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sudah menjadi pengadilan yang ramah anak di Kota Padang.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. SIMPULAN**

1. Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak adalah: Pertama, melakukan

kerja sama atau berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Padang. Kedua, melakukan kerja sama atau berkolaborasi dengan Perusahaan atau Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) yang ada di Kota Padang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:
  - a. Permasalahan pendanaan pasca Covid-19
  - b. Kehadiran anak yang berasal dari luar Kota Padang
  - c. Masih kurangnya fasilitas yang ramah anak
  - d. Masih kurangnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
3. Upaya yang dilakukan:
  - a. Program Kabupaten/Kota Layak Anak
  - b. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
  - c. Sekolah Ramah Anak
  - d. Masjid Ramah Anak
  - e. Pengadilan Ramah Anak

## **B. SARAN**

1. Agar DP3AP2KB menambah dan memperkuat program-program yang berkontribusi pada anak di Kota Padang.
2. Agar DP3AP2KB meningkatkan kerja sama dengan organisasi dan lembaga terkait di Kota Padang.
3. Agar DP3AP2KB aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana

### **C. Sumber lainnya**

Arliman Laurensius, Roza Darmini, 2018, 'Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25, Nomor 1.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.